

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Penelitian ini berfokus kepada pemetaan konflik Proyek Strategis Nasional di Air Bangis, Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan teori pemetaan konflik SIPABIO dan juga analisis ekonomi politik Marxis dan konsep kelas Marhaenisme Soekarno. Terdapat tujuh aspek dalam teori SIPABIO yaitu Source, Issue, Parties, Attitude, Behavior, Intervention, Outcome. Ketujuh aspek ini peneliti gunakan untuk memetakan konflik yang terjadi di Air Bangis oleh adanya usulan Proyek Strategis Nasional.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh adanya upaya dari pihak-pihak yang berkonflik dalam menguasai lahan di Air Bangis. Berdasarkan penjelasan peneliti pada bab sebelumnya, bahwa konflik disebabkan oleh perbedaan klaim-klaim mengenai status kepemilikan lahan yang akan dijadikan sebagai proyek pembangunan kilang minyak dalam proyek strategis nasional. Adanya double claim antara masyarakat yang mengakui sebagai lahan adat mereka yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan lahan dan juga eksistensi masyarakat yang telah menetap terlebih dahulu dilahan tersebut. Sementara klaim oleh pemerintah yang mengklaim lahan tersebut sebagai kawasan hutan, dengan bukti berupa Surat Keputusan 623/Kpts/Um/8/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat menunjukkan bahwa kawasan yang berada di Air Bangis merupakan milik negara, hal ini yang menjadi penyebab konflik di Air Bangis.

Benturan sistem hukum yang terjadi dalam konflik ini menunjukkan bahwa sistem hukum agraria dan perhutanan di Indonesia seringkali tidak menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat adat yang eksistensinya terlebih dahulu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Terdapat legal pluralism atau sistem kegandaan hukum yang ada di Air Bangis menjadi salah satu penyebab konflik yang terjadi. Selain itu, isu-isu yang beredar ditengah-tengah konflik adalah bahwa mayoritas masyarakat yang menolak dan menuntut untuk dibatalkannya PSN di Air Bangis merupakan masyarakat pendatang. Hal ini yang membuat konflik semakin parah karena sikap dari pemerintah nagari yang tidak menyukai tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Pigogah Patibubur yang notabene merupakan masyarakat pendatang yang seolah-olah menolak PSN untuk mempertahankan kepentingan mereka.

Kemudian adanya intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak keamanan terhadap masyarakat pekebun sawit yang beranggapan bahwa segala tindakan atau aktivitas yang dilakukan masyarakat pekebun merupakan tindakan yang melanggar hukum karena mengelola dan mengambil hasil sawit termasuk kedalam pencurian hasil hutan.

Berdasarkan pemetaan konflik, bahwa dalam konflik PSN di Air Bangis terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam konflik ini. Diantaranya adalah negara sebagai pemangku kebijakan, kemudian masyarakat yang melakukan penolakan, dan juga beberapa pihak yang berkepentingan seperti pengusaha tambang, pemilik lahan pribadi, dan juga perusahaan yang akan menggarap lahan tersebut sebagai proyek strategis nasional (dalam hal ini PT Abaco Pasific).

Selain itu, tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan PSN menjadi penyebab penolakan PSN yang dilakukan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui sebelumnya mengenai apa rencana dalam PSN tersebut. Ketika masyarakat mengetahui bahwa rencana PSN akan dibangun diatas lahan yang mereka tempat, menimbulkan kekhawatiran akan dampak yang akan dialami apabila proyek ini disahkan dan dilakukan pembangunan diatas lahan kawasan tersebut. Kekhawatiran masyarakat didasari oleh kepentingan perekonomian yang dilakukan dilahan kawasan tersebut yang dimana isu-isu yang beredar adalah masyarakat dan pemukiman yang berada didalamnya akan digusur untuk dijadikan pembangunan kilang minyak. Tentunya ini menciptakan kekecewaan dan amarah dari masyarakat yang menolak karena sebelumnya sudah terjadi konflik diatas lahan tersebut.

Penelitian ini melihat bahwa Proyek Strategis Nasional merupakan bentuk dari dominasi negara dan perusahaan dalam upaya menguasai sumber daya alam (dalam hal ini lahan 30.162 hektar yang berada didalam kawasan hutan) yang dimana pihak yang terdampak dalam konflik ini adalah masyarakat yang menetap dan mengelola lahan sawit diatas lahan tersebut. Proyek strategis nasional yang diharapkan akan menjadi pembangunan berskala nasional yang akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan juga investasi dinilai tidak mencerminkan dan justru mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas tanah ulayat dan sumber penghidupan mereka. Konflik ini juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan juga dampak lingkungan. Kekhawatiran masyarakat akan potensi pengusuran dan dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi menjadi alasan penolakan yang

dilakukan, sementara pemerintah melihat proyek strategis nasional di Air Bangis merupakan peluang ekonomi yang besar dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan juga investasi. Akan tetapi, dengan tidak adanya keterlibatan masyarakat dan persetujuan dari masyarakat lokal, proyek ini menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di Air Bangis.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan penjelasan mengenai konflik PSN di Air Bangis, dan juga kesimpulan dalam penelitian ini, berikut beberapa saran yang bisa peneliti berikan secara akademis maupun praktis. Diantaranya:

### **6.2.1. Saran Akademis**

1. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan melihat dari aspek dampak sosial dan lingkungan secara mendalam dan lebih komprehensif dalam dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya proyek strategis nasional di Air Bangis.
2. Peneliti berikutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai peran lembaga adat dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal.
3. Penelitian berikutnya dapat dilanjutkan dengan menganalisis kebijakan pemerintah terkait program Proyek Strategis Nasional. Dalam hal ini dapat ditelusuri mengenai proses pengambilan keputusan, sosialisasi, dan juga partisipasi masyarakat. Hal ini penting dalam mengidentifikasi kelemahan

dalam sistem kebijakan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak oleh kebijakan PSN.

### 6.2.2. Saran Praktis

1. Adapun saran praktis yang dapat peneliti berikan adalah perlu adanya revisi kebijakan dan juga kajian yang mendalam mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya PSN disuatu daerah, dalam hal ini khususnya yang terdampak di Air Bangis, Pasaman Barat.
2. Perlu meningkatkan sosialisasi mengenai PSN kepada masyarakat lokal serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi-potensi konflik.
3. Pemerintah harus menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta melindungi dari tindakan intimidasi dan kekerasan.

